

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SERTA KERANGKA PENDANAAN

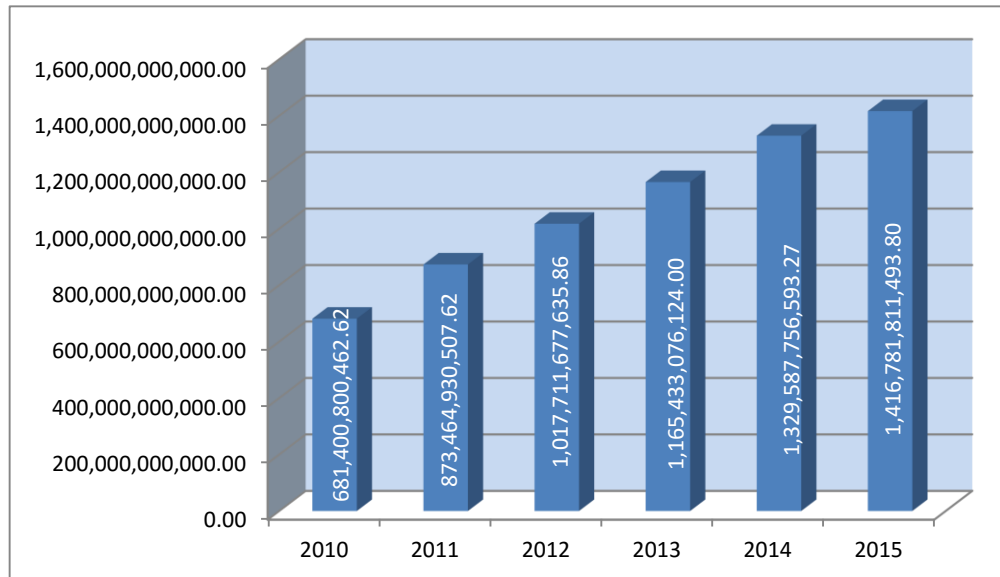
3.1. Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2010-2015

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Data realisasi keuangan daerah Kabupaten Rembang tahun 2010-2015 perlu disampaikan untuk memberikan gambaran kinerja realisasi APBD tahun 2010 – 2015 dan dapat dipergunakan sbagai dasar analisis, mencakup analisis kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Analisis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang periode 2010 sampai dengan 2015 dilihat dari berbagai sudut pandang diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan

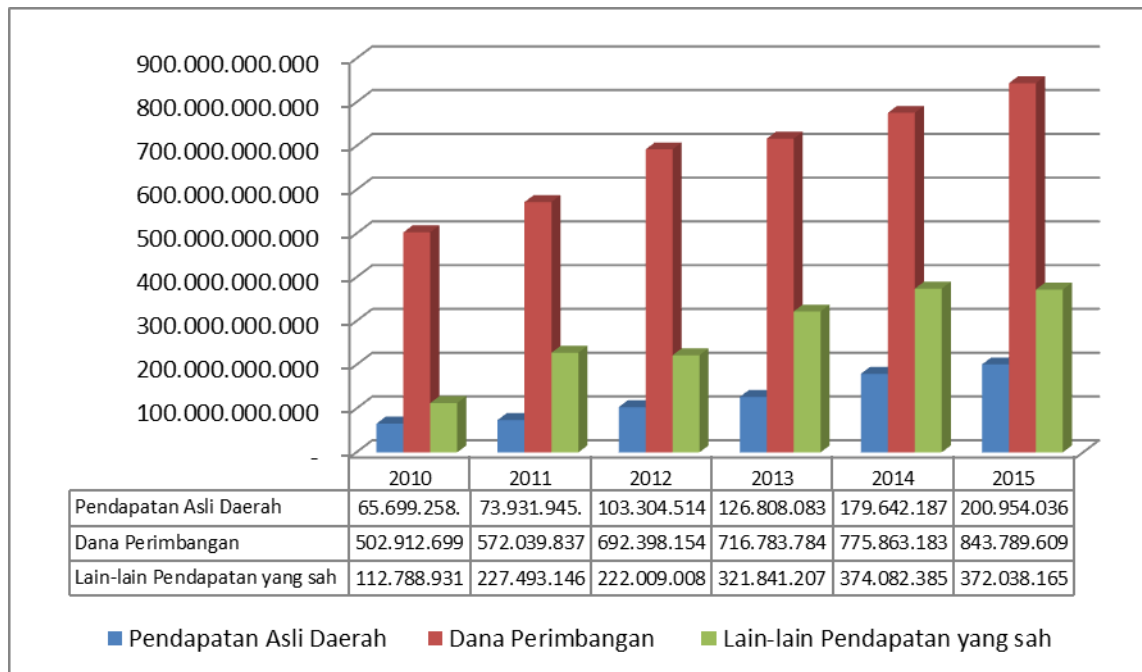
Pendapatan daerah selama tahun 2010 hingga tahun 2015 selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2010 pendapatan daerah Kabupaten Rembang sebesar Rp 681.400.800.462,62,-. Pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 873.464.930.507,62, selanjutnya pada tahun 2012 mengalami peningkatan cukup besar yaitu menjadi Rp. 1.017.711.677.635,86. Pada tahun 2013 kembali meningkat menjadi sebesar Rp 1.165.433.076.124,00 selanjutnya mengalami peningkatan hingga pada tahun 2015 menjadi Rp 1.416.781.811,493,80. Grafik Perkembangan pendapatan daerah selama tahun 2010-2015 dapat dilihat pada gambar 3.1. berikut ini:



Gambar 3.1
Grafik Perkembangan Pendapatan Daerah
Tahun 2010-2015 (ribuan)

Sumber: DPPKAD Kabupaten Rembang 2015

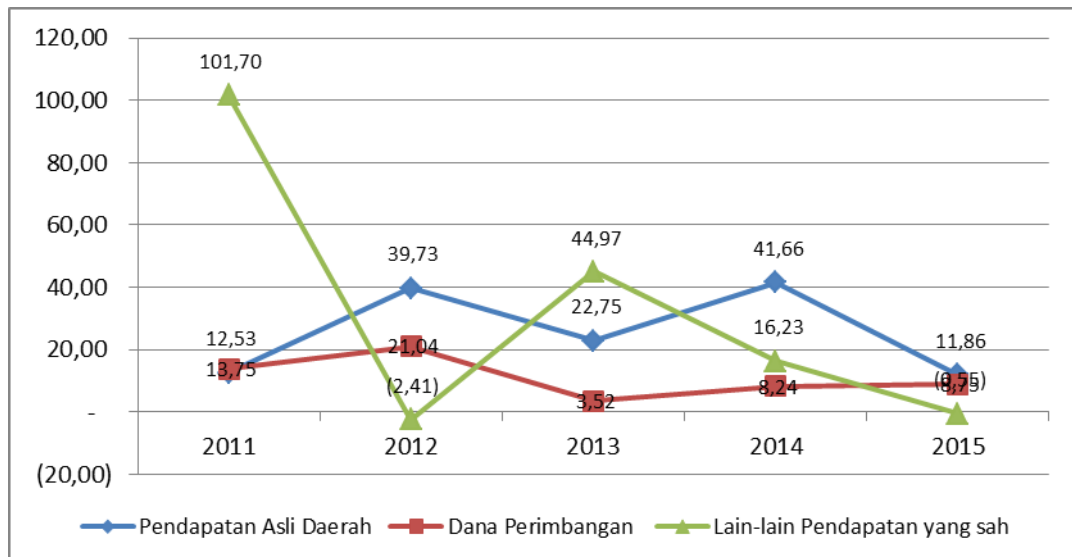
Gambaran perkembangan secara nominal masing-masing sumber pendapatan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 PAD sebesar Rp. 65.699.258.000,00, pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 73.931.945.000,00, pada tahun 2012 PAD mengalami peningkatan cukup tajam karena PBB sudah mulai dipungut sebagai implementasi UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu menjadi sebesar Rp. 103.304.514.000,00 pada tahun 2014 meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 179.642.187.487,00, dan pada tahun 2015 menjadi Rp. 200.954.036.864,00. Sementara itu peningkatan pendapatan dari Dana Perimbangan tidak begitu besar secara nominal. Grafik Perkembangan masing-masing sumber pendapatan daerah selama tahun 2010-2015 dapat dilihat pada gambar 3.2. berikut ini.



Gambar 3.2
Grafik Perkembangan Masing-Masing Unsur Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 (000 Rupiah)

Sumber: DPPKAD Kabupaten Rembang 2015

Berdasarkan data di atas masing-masing sumber pendapatan daerah dalam APBD selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup besar. Sumber pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), perkembangan selama kurun waktu 2010 – 2015 rata-rata tumbuh sebesar 25,71%, dengan persentase pertumbuhan cenderung meningkat. Sumber pendapatan daerah dari dana perimbangan selama kurun waktu 2011 – 2015 juga mengalami peningkatan. Dana perimbangan selama kurun waktu 2011 – 2015 juga mengalami peningkatan, rata-rata pertumbuhan sejak tahun 2011 sampai dengan 2015 sebesar 11,06%, kinerja pertumbuhan dari tahun 2011 -2015 cenderung menurun. Sumber pendapatan yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah juga mengalami peningkatan cukup drastis. Secara rata-rata sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 31,99%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 mencapai 44,97%. Kinerja pertumbuhan sumber pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan yang sah selama tahun 2010 – 2015 fluktuatif. Grafik pertumbuhan masing-masing sumber pendapatan terlihat pada Gambar 3.3 berikut:



Gambar 3.3
Grafik Pertumbuhan Masing-Masing Unsur Pendapatan
Tahun 2011-2015 (%)

Sumber: DPPKAD Kabupaten Rembang 2015

Secara rinci rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Rembang tahun 2010-2015 disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1.
rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Rembang tahun 2010-2015

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R
1	2	3	4	6	8	10	12	14
A	PENDAPATAN	681.400.890.462,62	873.464.930.507,62	1.017.711.677.635,86	1.165.433.076.124,01	1.329.587.756.593,27	1.416.781.811.493,80	15.974
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	65.699.258.994,62	73.931.945.930,62	103.304.514.980,86	126.808.083.812,01	179.642.187.487,27	200.954.036.864,80	25.706
	Pendapatan Pajak Daerah	13.358.017.629,00	14.568.408.017,00	21.691.251.109,00	34.067.851.784,00	38.643.241.316,00	42.306.265.606,00	27.584
	Hasil Retribusi Daerah	19.172.685.442,00	21.051.282.763,00	26.290.263.055,00	30.924.102.833,00	41.529.546.666,00	32.230.052.368,00	12.846
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.123.502.944,00	2.678.745.388,00	3.318.450.860,00	3.277.635.260,00	6.183.205.661,00	4.447.117.385,00	9.636
	Lainlain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29.045.052.979,62	35.633.509.762,62	52.004.549.956,86	58.538.493.935,01	93.286.193.844,27	121.970.601.505,80	34.258
2	DANA PERIMBANGAN	502.912.699.480,00	572.039.837.614,00	692.398.154.559,00	716.783.784.793,00	775.863.183.184,00	843.789.609.235,00	11.06
	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	42.599.303.480,00	40.967.698.614,00	43.592.546.559,00	34.411.514.793,00	28.882.462.184,00	22.278.754.235,00	-11.482
	Dana Alokasi Umum	411.434.996.000,00	468.744.939.000,00	570.454.948.000,00	640.273.360.000,00	700.774.721.000,00	723.091.447.000,00	12.1
	Dana Alokasi Khusus	48.878.400.000,00	62.327.200.000,00	78.350.660.000,00	42.098.910.000,00	46.206.000.000,00	98.419.408.000,00	25.942
3	LAINLAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	112.788.931.988,00	227.493.146.963,00	222.009.008.096,00	321.841.207.519,00	374.082.385.922,00	372.038.165.394,00	34.3
	Pendapatan Hibah	1.099.042.917,00	831.235.340,00	680.367.844,00	74.995.000,00	541.721.500,00	138.351.272,00	-51.49
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	24.300.566.671,00	33.787.705.323,00	43.688.030.252,00	55.168.716.988,00	72.995.869.203,00	93.284.137.342,00	31.7325
	Dana Percepatan dan Penguatan Pembangunan Infrastruktur Daerah							
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	63.527.474.400,00	113.035.151.300,00	96.417.785.000,00	150.500.902.000,00	172.399.233.000,00	268.241.945.000,00	37.892
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	23.861.848.000,00	79.839.055.000,00	81.222.825.000,00	116.096.593.531,00	128.145.562.219,00	10.373.731.780,00	39.548
	Dana Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)							

Sumber : DPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2016

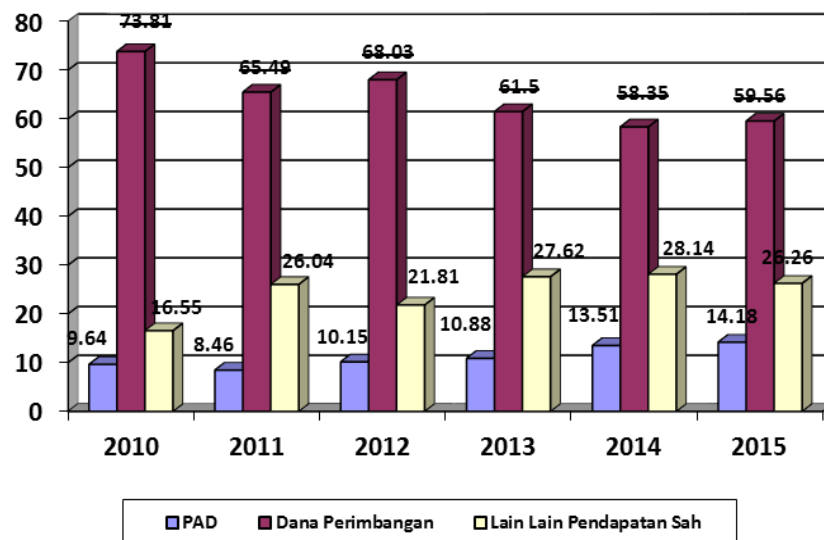
Pada tahun 2015, pendapatan dari pos Retribusi Daerah mengalami penurunan karena ada pengalihan pendapatan dari PPK BLUD Puskesmas yaitu berupa Kapitasi dari Jaminan Kesehatan Nasional masuk pada pos pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, pendapatan tersebut sebelumnya merupakan pos retribusi daerah. Pada tahun 2014 dan 2015 pos retribusi mengalami penurunan cukup tajam dan pos pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah mengalami pertumbuhan cukup tinggi.

Kondisi pertumbuhan dari masing-masing sumber pendapatan di Kabupaten Rembang selama tahun 2010 hingga tahun 2015 menunjukkan bahwa telah terjadi kondisi yang meningkat secara nominal namun secara proporsional proporsi dana Perimbangan menurun. Secara rata-rata laju pertumbuhan Lain-lain pendapatan yang sah di Kabupaten Rembang sebesar 34,26%. Meskipun pada tahun 2014 sempat terjadi pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 59,36%. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang selama kurun waktu 2010 – 2015 cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 25,71%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan dana perimbangan sebesar 11,06%

Proporsi masing-masing sumber pendapatan terhadap total APBD dapat dijelaskan bahwa untuk PAD, proporsi PAD terhadap total APBD dari tahun 2010 – 2015 meningkat. Pada tahun 2010 proporsi PAD terhadap total APBD sebesar 9,64% dan pada tahun 2015 proporsi PAD terhadap total APBD sebesar 14,18%. Sedangkan untuk proporsi pendapatan dari Dana Perimbangan selama kurun waktu 2010 – 2015 cenderung menurun walaupun secara nominal mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 proporsi Pendapatan Transfer terhadap total APBD sebesar 73,81% dan pada tahun 2015 menjadi sebesar 59,56%, Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat sedikit berkurang. Demikian juga untuk pendapatan yang bersumber dari lain-lain Pendapatan yang Sah, Proporsi sumber pendapatan dari Pos Lain-

lain Pendapatan yang Sah terhadap total APBD pada tahun 2010 sebesar 16,55% pada tahun 2015 meningkat menjadi 26,26%.

Secara rinci Grafik perkembangan proporsi masing-masing sumber pendapatan selama tahun 2010-2015 dapat dilihat pada gambar 3.4 berikut ini:



Gambar 3.4
Grafik Perkembangan Proporsi Masing-Masing Unsur
Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah
Tahun 2010-2015 (%)

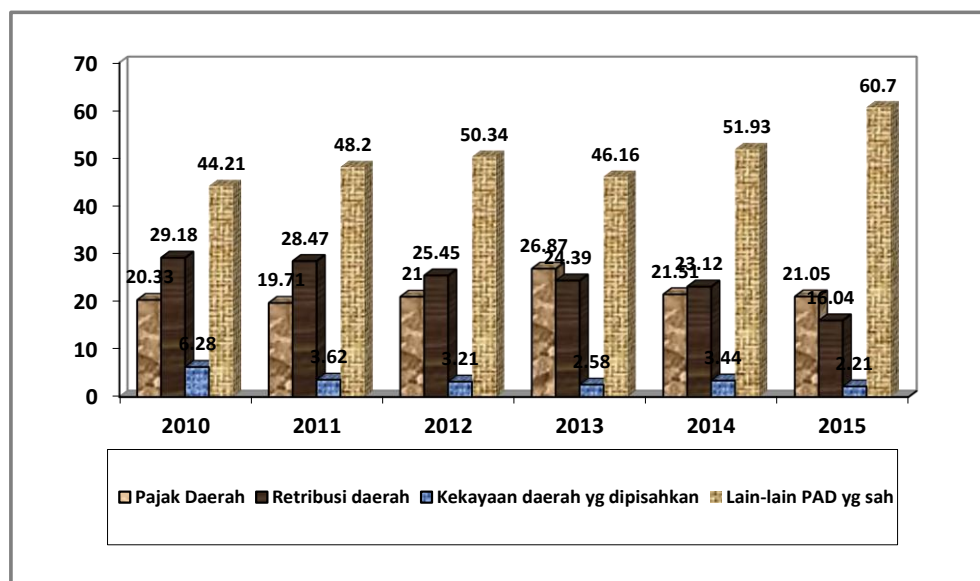
Sumber: DPPKAD Kabupaten Rembang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Pendapatan Asli Daerah berasal dari empat sumber pendapatan yaitu (1) Pendapatan Pajak Daerah, (2) Pendapatan Retribusi Daerah, (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Hingga saat ini PAD Kabupaten Rembang sebagian besar berasal dari pos Lain-lain PAD yang sah. Rata-rata proporsi Lain-lain PAD yang sah selama lima tahun sebesar 50,25% dari total PAD. Pos PAD terbesar kedua adalah Retribusi Daerah, proporsi Retribusi Daerah di Kabupaten Rembang rata-rata selama lima tahun sebesar 24,44% dari PAD.

Selanjutnya pos pendapatan PAD terbesar ketiga adalah Pajak Daerah, rata-rata proporsi sumber pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah selama lima tahun terakhir sebesar

21,74%, selama tahun 2010 – 2015 proporsi Pajak Daerah terhadap total PAD mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 proporsi Pajak Daerah adalah sebesar 20,33% dan pada tahun 2015 menjadi sebesar 21,05%.

Komponen PAD yang mempunyai kontribusi paling rendah terhadap PAD di Kabupaten Rembang adalah Pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Komponen ini juga mengalami penurunan. Pada tahun 2010 komponen Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai proporsi terhadap PAD sebesar 6,28% kemudian semakin menurun menjadi 2,21% pada tahun 2015. Secara rata-rata proporsi Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD adalah sebesar 3,56% per tahun. Grafik Perkembangan proporsi masing-masing pos yang menjadi unsur PAD dapat dilihat pada gambar 3.5 berikut:

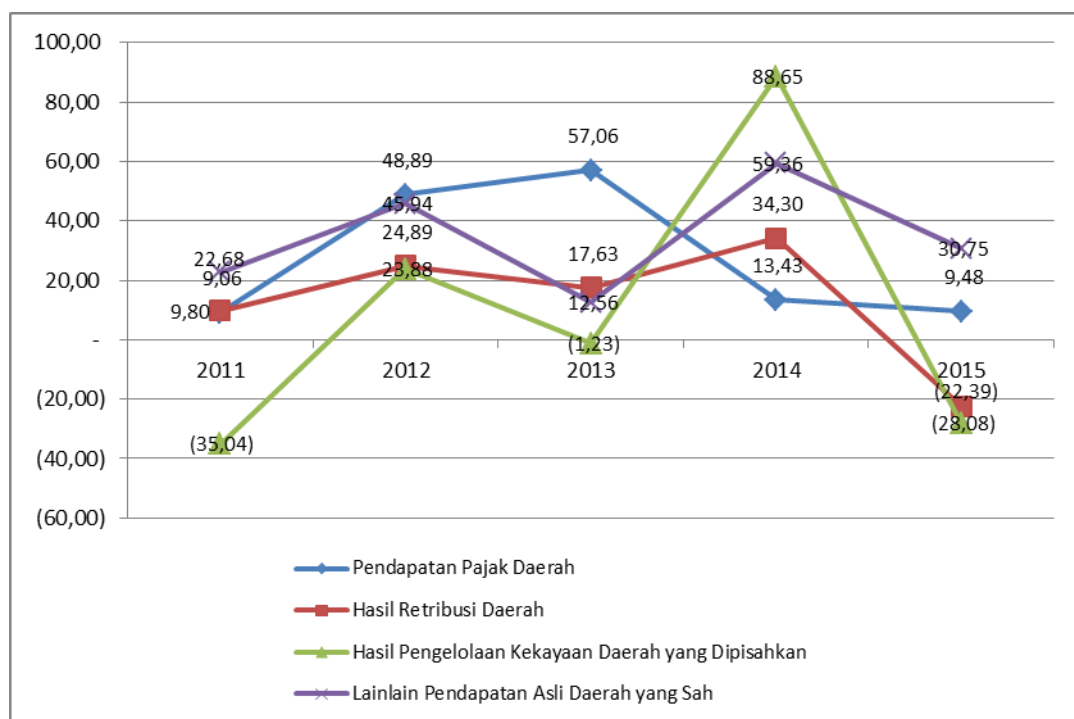


Gambar 3.5
Grafik Proporsi Masing-Masing Unsur PAD
Tahun 2010-2015 (%)

Sumber: DPPKAD Kabupaten Rembang

Pertumbuhan masing-masing komponen dalam Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 fluktuatif. Dari keempat komponen PAD yang terdiri dari (1) Pendapatan Pajak Daerah, (2) Pendapatan Retribusi Daerah, (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

sah, menunjukkan bahwa pertumbuhan Rata-rata Pendapatan pajak daerah selama lima tahun terakhir sebesar 25,71% per tahun. Sedangkan komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah mempunyai nilai rata-rata pertumbuhan tertinggi sebesar 34,26% per tahun. Rata-rata pertumbuhan komponen Retribusi Daerah sebesar 12,84%. Pertumbuhan komponen hasil kekayaan daerah yang dipisahkan selama kurun waktu 2010 sampai dengan tahun 2015 fluktuatif, pertumbuhan komponen Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada tahun 2014 mempunyai pertumbuhan paling tinggi dibandingkan yang lain yaitu sebesar 59,3%. Secara rinci Grafik pertumbuhan masing-masing komponen PAD terlihat pada Gambar 3.6 berikut:



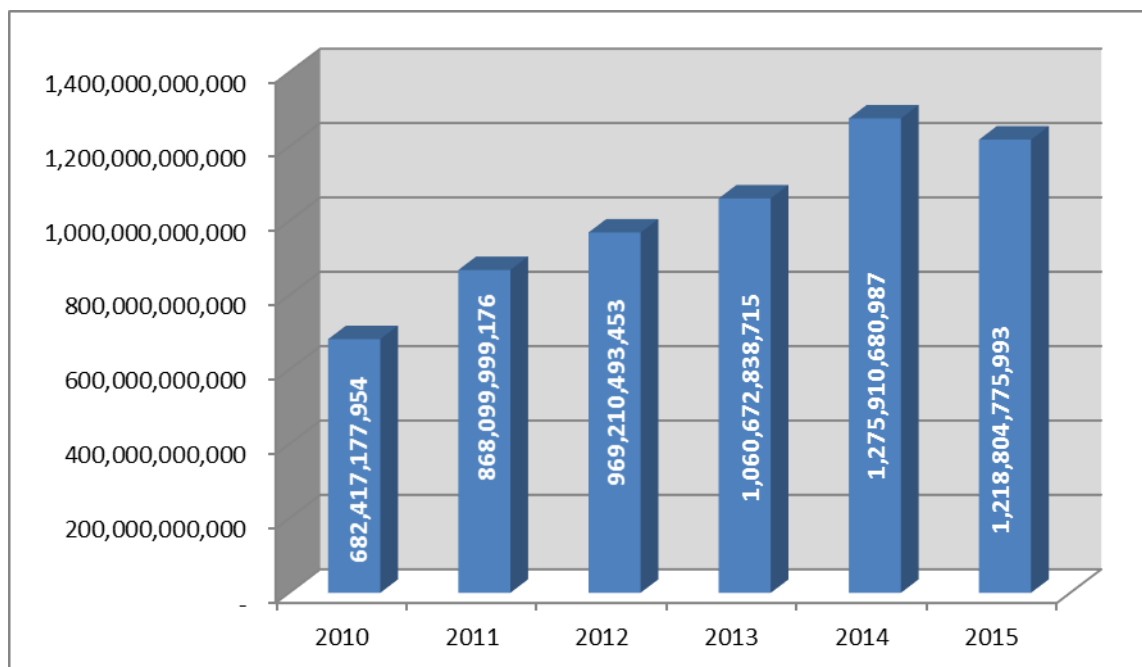
Gambar 3.6
Grafik Pertumbuhan Masing-Masing Komponen PAD
Tahun 2011-2015 (%)

Sumber: DPPKAD Kabupaten Rembang, 2016

2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan salah satu komponen kebijakan keuangan daerah dalam alokasi anggaran. Pengalokasian anggaran yang tepat mengarah pada skala prioritas, diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi daerah. Kebijakan dalam penetapan alokasi belanja pembangunan tidak bisa terlepas dari perhitungan kebutuhan rutin yang harus dipenuhi, meliputi belanja pegawai, belanja pemeliharaan, belanja operasional.

Besarnya belanja daerah di Kabupaten Rembang selama lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 besarnya belanja sebesar Rp.682.413.462.558,00 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp.1.218.804.775.593,00. Apabila dikaitkan dengan Tabel 3.1 tentang Besarnya Pendapatan, maka belanja lebih kecil dari total pendapatan sehingga selalu terjadi surplus, kecuali pada tahun 2010, terjadi defisit anggaran. Selengkapnya grafik perkembangan belanja daerah tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut:



Gambar 3.7
Grafik Perkembangan Belanja Daerah
Tahun 2010-2015 (Rupiah)

Sumber: DPPKAD Kabupaten Rembang

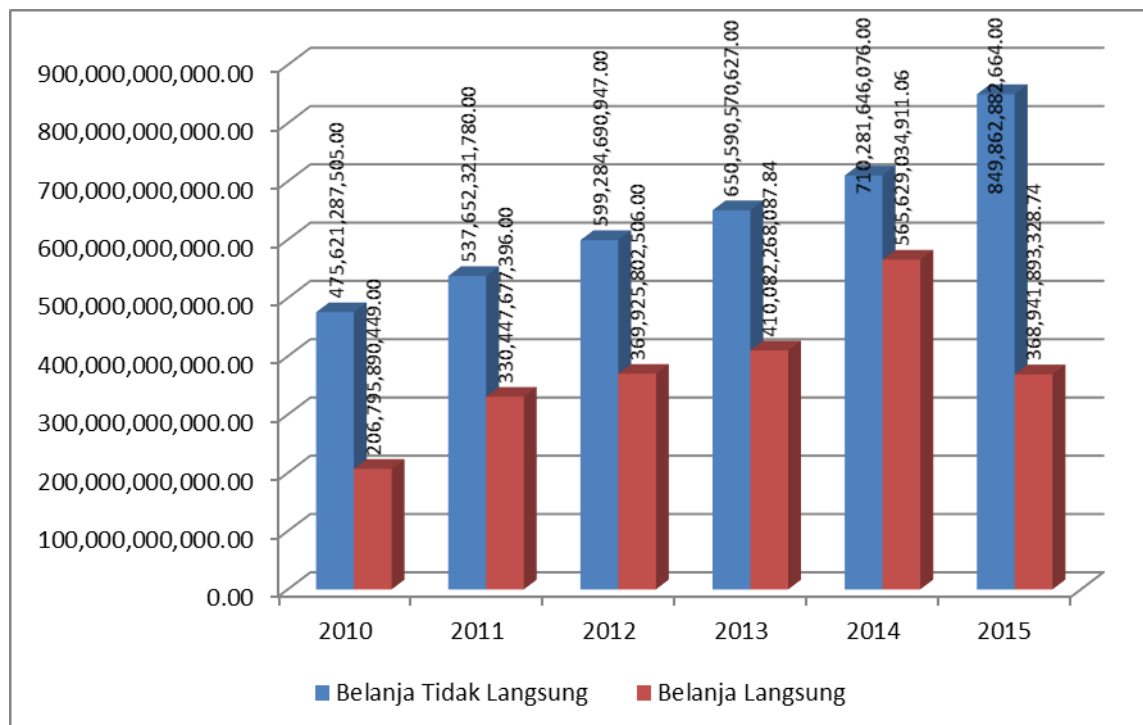
Secara rinci rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Rembang tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	BELANJA	682.417.177.954,00	868.099.999.176,00	969.210.493.453,00	1.060.672.838.714,84	1.275.910.680.987,06	1.218.804.775.992,74	12.82
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	475.621.287.505,00	537.652.321.780,00	599.284.690.947,00	650.590.570.627,00	710.281.646.076,00	849.862.882.664,00	12.38
	Belanja Pegawai	401.035.949.205,00	465.105.590.987,00	521.336.331.735,00	572.841.155.868,00	632.727.603.459,00	661.607.200.077,00	10.59
	Belanja bunga	41.390.069,00	36.627.375,00	22.382.912,00	20.708.119,00	14.340.417,00	7.985.987,00	(26.59)
	Belanja Subsidi			700.000.000,00				
	Belanja Hibah	15.387.143.300,00	8.754.897.150,00	30.221.506.900,00	42.862.476.900,00	39.727.269.200,00	23.873.745.800,00	39.34
	Belanja Bantuan Sosial	33.854.673.931,00	35.458.167.518,00	11.927.766.000,00	1.800.500.000,00	2.552.273.000,00	2.714.000.000,00	(19.69)
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa						6.157.224.400,00	
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	24.809.308.500,00	27.613.944.000,00	34.088.248.000,00	32.688.824.740,00	35.163.035.000,00	155.502.726.400,00	76.09
	Belanja Tidak Terduga	492.822.500,00	683.094.750,00	988.455.400,00	376.905.000,00	97.125.000,00		(30.56)
2	BELANJA LANGSUNG	206.795.890.449,00	330.447.677.396,00	369.925.802.506,00	410.082.268.087,84	565.629.034.911,06	368.941.893.328,74	17.15
	Belanja Pegawai	36.751.327.617,00	48.086.943.959,00	53.878.955.719,00	61.041.654.893,00	86.882.064.160,00	113.995.499.657,00	25.94
	Belanja Barang dan Jasa	77.914.300.732,00	94.367.463.645,00	115.843.189.592,00	213.592.815.850,84	327.292.056.989,06	202.965.666.652,74	28.70
	Belanja Modal	92.130.262.100,00	187.993.269.792,00	200.203.657.195,00	135.447.797.344,00	151.454.913.762,00	51.980.727.019,00	4.87

Sumber : DPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2016

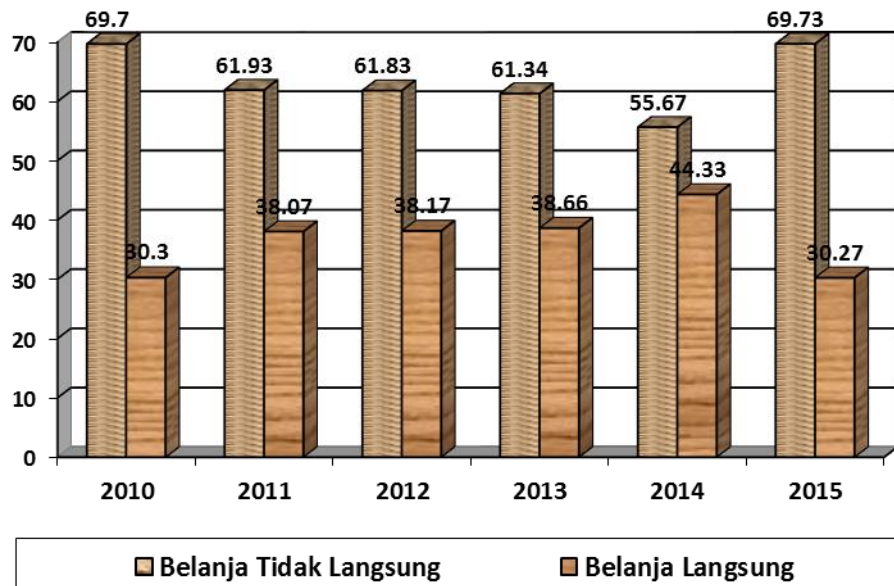
Selanjutnya untuk Grafik Perkembangan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Gambar 3.8 berikut ini:



Gambar 3.8
Grafik Perkembangan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 (Rupiah)

Sumber : DPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2016

Dilihat dari proporsinya, Belanja daerah selama kurun waktu tahun 2010-2015 terjadi fluktuasi proporsi masing-masing unsur belanja terhadap total belanja daerah. Proporsi belanja Langsung terhadap total belanja daerah fluktuatif dari sebesar 30,3% pada tahun 2010 menjadi sebesar 30,27% pada tahun 2015. Angka proporsi tertinggi belanja langsung terhadap total belanja terjadi pada tahun 2014 sebesar 43,44%. Kecenderungan peningkatan proporsi Belanja Langsung menunjukkan adanya komitmen pemerintah Kabupaten Rembang untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah. Secara rinci Grafik proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja Daerah dapat dilihat pada gambar 3.9.



Gambar 3.9
Grafik Perkembangan Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Rembang terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2010-2015 (%)

Sumber : DPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2016

Salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah dengan semakin besarnya porsi Belanja Langsung terhadap total belanja daerah. Belanja Langsung yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan potensi-penerimaan daerah yang baru. Rasio Belanja Langsung terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk pembangunan daerah. Belanja Langsung, merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri, oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran pemerintah daerah pembiayaan daerah terutama dimaksudkan

untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara itu pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

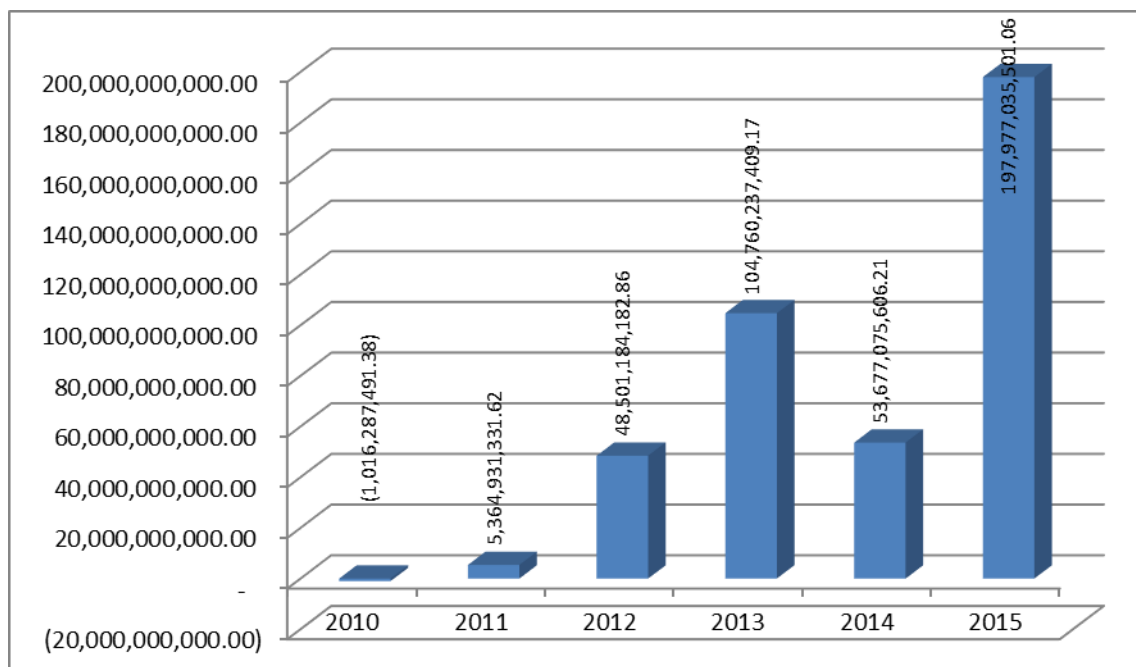
Dalam kurun waktu tahun 2010-2015 penerimaan pembiayaan daerah menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp 33.306.107.523,07 pada tahun 2010 menjadi Rp 209.301.180.147,55 pada tahun 2015. Pengeluaran pembiayaan daerah meskipun fluktuatif cenderung meningkat dari sebesar Rp 4.175.435.482,00 pada tahun 2010, menjadi sebesar Rp 10.670.450.843,00 pada tahun 2015. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) meningkat dari sebesar Rp 28.114.384.549,69 pada tahun 2010 menjadi Rp 396.607.764.805,61 pada tahun 2015. Secara rinci rata-rata perkembangan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Rembang tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Rata-Rata Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	r
1	2	3	4	5	6	7	8	
C	PEMBIAYAAN DAERAH							
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	33.306.107.523,07	28.118.099.945,69	33.462.940.243,31	67.555.128.713,17	167.066.868.874,34	209.301.180.147,55	55.58
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	29.312.122.883,07	28.118.099.945,69	33.462.940.243,31	67.555.128.713,17	167.066.868.874,34	209.301.180.147,55	57.88
	Penerimaan Kembali Pemberi Pinjaman	2.493.984.640,00						(100.00)
	Penerimaan Kembali Investasi							
	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00						(100.00)
	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah							
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.175.435.482,00	53.450.842,00	14.440.865.413,00	5.253.450.842,00	11.162.450.842,00	10.670.450.843,00	(13.57)
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	128.000.000,00		5.000.000.000,00	5.200.000.000,00	11.109.000.000,00	10.617.000.000,00	3.30
	Pembayaran Pokok Utang	1.553.450.842,00	53.450.842,00	9.440.865.413,00	53.450.842,00	53.450.842,00	53.450.843,00	(65.33)
	Pemberian Pinjaman Daerah	2.493.984.640,00						(100.00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN	28.114.384.549,69	33.429.580.435,31	67.523.259.013,17	167.061.915.280,34	209.581.493.638,55	396.607.764.805,61	76.60

Sumber : DPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2016

Surplus/defisit menunjukkan selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Jika pendapatan lebih besar daripada belanja, maka terjadi surplus, kalau sebaliknya maka terjadi defisit. Besaran defisit menunjukkan tingkat belanja yang tidak dapat dipenuhi oleh pendapatan daerah. Dalam Kurun tahun 2010-2015 defisit terjadi pada tahun 2010, sedangkan surplus terjadi pada tahun 2011-2015. Ada kecenderungan peningkatan surplus APBD dari sebesar Rp 5.364.931.331,62 pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp 197.977.035.501,06 pada tahun 2015. Selengkapnya Grafik Selisih Pendapatan dan Belanja Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada gambar 3.10 berikut:



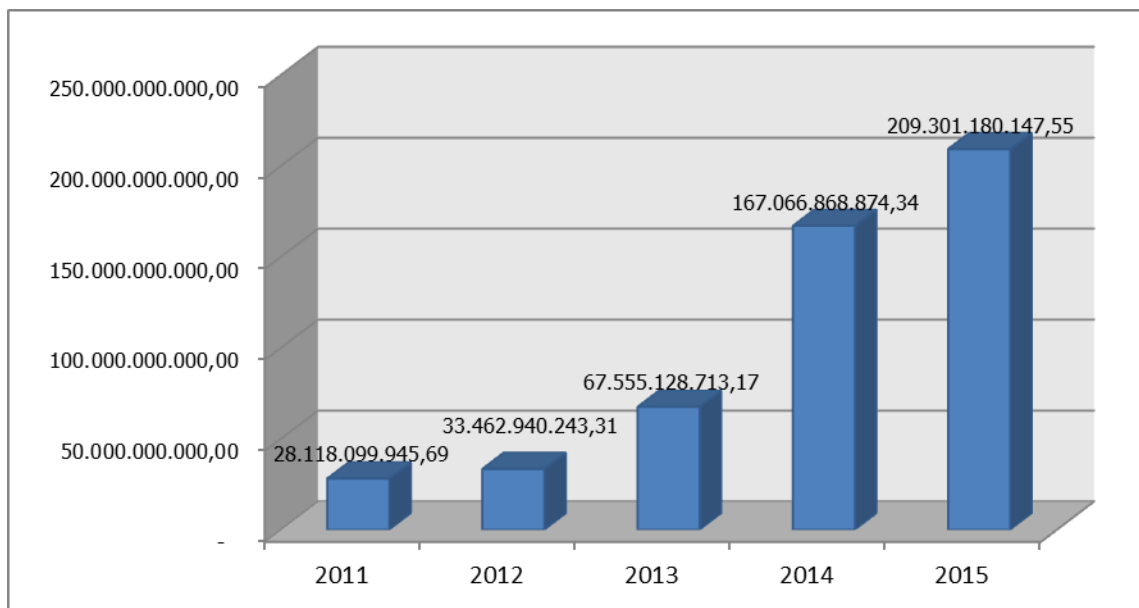
Gambar 3.10
Grafik Selisih Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 (Rp.)

Sumber : DPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2016

Pelampauan Pendapatan atau penghematan belanja pada realisasi APBD sebelumnya akan menghasilkan sisa dana. Sisa dana tersebut dinamakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disingkat SiLPA. Namun demikian, mengingat bahwa APBD dibuat sebelum berakhirnya tahun anggaran maka SiLPA yang terdapat di APBD merupakan nilai estimasi.

Semakin besar SiLPA pada dasarnya menunjukkan semakin besarnya dana publik yang belum atau tidak digunakan dalam belanja

atau pengeluaran pembiayaan lain sehingga mengendap di kas daerah sebagai dana idle. Kondisi yang terjadi di Kabupaten Rembang selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan bahwa pada tahun 2010 terdapat SiLPA sebesar Rp 29.312.122.883,07 dan meningkat menjadi Rp 209.301.180.147,55,-. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara rata-rata selama lima tahun terakhir terjadi pertumbuhan SiLPA sebesar 57,58%. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Rembang masih banyak dana publik yang belum digunakan dalam belanja maupun pengeluaran yang lain. Sehingga masih ada dana yang mengendap di kas daerah atau tidak terserap. Grafik Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada gambar 3.11.

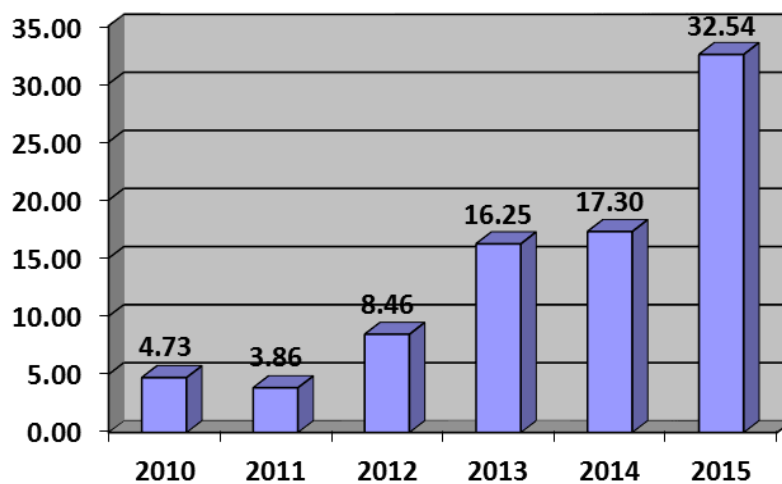


Gambar 3.11
Grafik Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Tahun 2011-2015 (Rp)

Sumber : DPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2016

Besarnya SiLPA pada akhir tahun tentunya menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Rasio ini diharapkan akan semakin turun mengingat tingginya SiLPA yang terjadi bisa ditengarai oleh karena rendahnya penyerapan belanja daerah, yang pada dasarnya mengindikasikan kurang efisien dan efektifnya perencanaan kegiatan. Sumber SiLPA selain itu adanya dana dari pusat yang tidak terserap. Sehingga rasio ini juga perlu dicermati oleh pemerintah pusat dalam melakukan kebijakan transfer ke daerah yang efisien dan efektif.

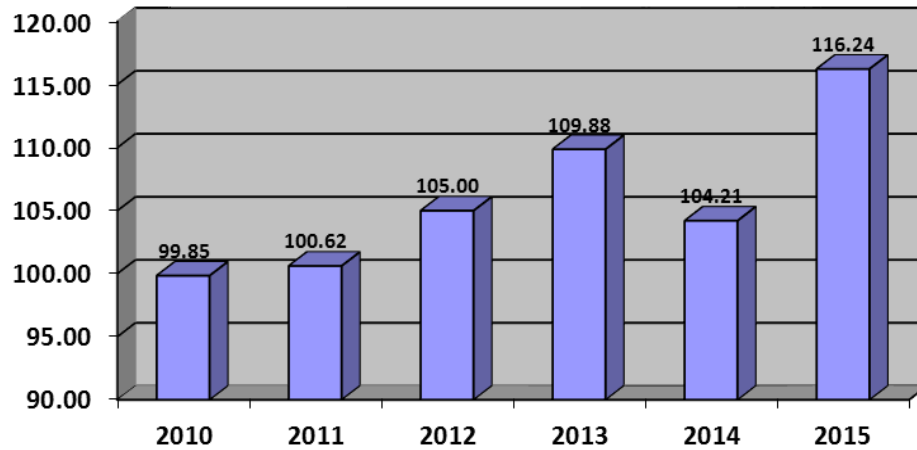
Kondisi yang terjadi di Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja menunjukkan ada peningkatan. Dengan kondisi ini maka dapat disampaikan bahwa terjadi penyerapan belanja yang kurang optimal dari tahun 2010 hingga tahun 2015. Meningkatnya rasio SiLPA terhadap anggaran belanja ini menyebabkan Pemerintah Kabupaten Rembang harus siap dalam membiayai belanjanya. Grafik Rasio SiLPA terhadap belanja tahun 2010-2015 dapat dilihat terlihat pada gambar 3.12 di bawah ini:



Gambar 3.12
Grafik Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja
Tahun 2010-2015 (%)

Sumber : DPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2016

Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Gambar 3.13 menunjukkan bahwa rasio kemampuan Kabupaten Rembang mendanai belanja daerah selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 terjadi defisit sebesar 0,15%, pada tahun 2011 mulai terjadi surplus sebesar 0,62% dan pada tahun 2015 terjadi surplus sebesar 16,24%. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara rata-rata kemampuan keuangan Kabupaten Rembang dalam mendanai belanja daerah cukup baik. Grafik Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada gambar 3.13 berikut:



Gambar 3.13
Grafik Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah
Tahun 2010-2015 (%)

Sumber : DPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2016

3.1.2. Neraca Daerah

Gambaran tentang posisi keuangan daerah berupa asset, kewajiban dan ekuitas dana tertuang dalam Neraca Daerah. Laporan Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang wajib dibuat oleh pemerintah daerah. Neraca Daerah mempunyai fungsi sebagai alat manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah. Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Gambaran neraca daerah Kabupaten Rembang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.
Neraca Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	ASET	1.450.840.887.158	1.450.840.887.158	1.450.840.887.158	1.720.547.289.000	1.450.840.887.158	1.670.477.085.975
1.1.	ASET LANCAR	47.238.303.769	45.502.519.584	48.563.091.202	204.738.774.832	233.956.464.423	401.526.932.993
1.1.1.	Kas	28.166.299.098	33.524.788.773	33.524.788.773	167.186.629.790	199.588.570.531	386.612.949.466
1.1.2.	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	10.000.000.000	10.000.000.000
1.1.3.	Piutang Pajak dan Retribusi	1.327.663.421	1.848.519.072	2.867.027.992	18.870.899.017	22.511.929.299	3.737.376.836
1.1.4.	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran						
1.1.5.	Piutang Lainnya	6.460.863.873	917.887.057	639.509.060	10.692.439.752	5.211.816.384	5.211.816.384
1.1.6.	Penyisihan Piutang					(13.364.647.327)	(13.364.647.327)
1.1.7.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	1.943.039.488					
1.1.8.	Beban Dibayar Dimuka	331.585.468	243.712.204	241.877.112	299.690.887	366.968.797	364.088.083
1.1.9.	Persediaan	9.008.852.421	8.967.612.478	11.289.888.265	7.689.115.385	9.641.826.739	8.965.349.552
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	59.296.461.414	56.357.891.091	56.212.467.745	60.169.735.278	77.842.155.673	77.842.155.673
1.3.	ASET TETAP	923.842.559.114	1.121.105.814.901	1.306.966.825.809	1.433.385.135.718	1.116.135.722.539	1.167.404.544.696
1.3.1.	Tanah	115.187.824.908	115.497.246.908	140.398.081.758	140.402.081.758	250.814.959.708	250.814.959.708
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	151.290.620.163	168.249.475.260	198.845.016.123	225.453.122.372	248.289.944.683	276.814.905.895
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	263.342.910.887	327.262.057.565	406.250.223.860	400.474.125.644	443.559.645.670	450.253.530.370
1.3.4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	374.989.633.794	472.535.992.018	507.781.706.928	612.710.025.493	691.612.662.174	706.428.574.619
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	19.031.569.362	37.561.043.150	48.605.830.140	49.586.780.451	55.287.097.954	56.521.161.754
1.3.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	5.085.967.000	4.759.000.000	4.759.000.000	4.759.000.000
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-	(578.187.587.650)	(578.187.587.650)

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.4.	DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
1.5.	ASET LAINNYA	14.674.209.522	16.449.471.415	19.751.786.921	22.253.643.172	22.906.544.524	23.703.452.614
1.5.1.	Tagihan Jangka Panjang						
1.5.2.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	-	-	-	-		
1.5.3.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.553.192.500	3.553.192.500	3.328.175.000	2.995.405.000	2.995.405.000	2.995.405.000
1.5.4.	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	2.978.202.500	2.978.202.500	2.978.202.500	2.978.202.500
1.5.5.	Aset Tidak Berwujud	247.900.000	340.755.000	803.003.484	3.484.490.234	3.930.230.657	3.930.230.657
1.5.6.	Aset Lain-lain	10.873.117.022	12.555.523.915	12.642.405.937	12.795.545.438	13.002.706.367	13.799.614.457
1.5.7	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain						
2	KEWAJIBAN	6.138.298.030	26.771.593.298	17.327.790.152	26.271.878.265	29.535.045.723	29.208.267.300
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.835.522.764	26.554.133.556	17.171.919.701	26.188.491.982	29.506.715.292	29.179.936.868
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	44.449.152	27.951.630	14.531.227	-	3.816.018	.075.660
2.1.2.	Utang Bunga				-	7.972.714	7.972.714
2.1.3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	94.840.911	90.078.217	75.833.754	74.158.961	53.450.840	53.450.840
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka				26.114.333.021	621.746.257	463.612.149
2.1.5.	Utang Beban					2.790.849.552	2.620.945.595
2.1.6.	Utang kepada pihak ketiga	5.696.232.701	26.436.103.709	17.081.554.720		26.028.879.911	26.028.879.911

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	302.775.265	217.459.742	155.870.451	83.386.283	28.330.431	28.330.431
2.2.1.	Utang Dalam Negeri						
2.2.2.	Utang Luar Negeri	302.775.265	217.459.742	155.870.451	83.386.283	28.330.431	28.330.431
3	EKUITAS	1.038.913.235.789	1.212.644.103.693	1.448.607.721.337	1.694.275.410.735	1.421.305.841.435	1.641.268.818.676
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.045.051.533.819	1.239.415.696.992	1.465.935.511.489	1.720.547.289.000	1.450.840.887.158	1.670.477.085.975

Sumber: DPPKAD Kabupaten Rembang 2016

Berdasarkan neraca daerah tersebut di atas, dapat diperoleh beberapa informasi berkaitan dengan beberapa hal yaitu rasio lancar, rasio cair (quick ratio), rasio total hutang terhadap aset dan rasio hutang terhadap modal. Uraian masing-masing rasio adalah sebagai berikut:

a. Rasio Lancar

Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya.

$$\text{Rasio Lancar} \\ (\text{Current Ratio}) = \frac{\text{Kas}}{\text{Hutang Jangka Pendek}}$$

b. Rasio Cair

Rasio Cair (*Quick Ratio*) dihitung dengan mengurangi persediaan dari aset lancar, dan hasilnya dibagi dengan hutang jangka pendek. Biasanya aset lancar terdiri atas kas di kas daerah, kas di pemegang kas bagian lancar tagihan penjualan/penerimaan, bagian lancar pinjaman, bagian lancar TPTGR, piutang pajak, piutang lain-lain dan persediaan. Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan.

$$\text{Rasio Cair} \\ (\text{Quick Ratio}) = \frac{(\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan})}{\text{Hutang Jangka Pendek}}$$

c. Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt Ratio*)

Rasio hutang terhadap aset adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya menggunakan aset yang dimilikinya. Rasio hutang terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan total aset. Kewajiban tersebut terdiri dari Hutang pada pihak ketiga, Hutang Luar Negeri, Hutang pada Pemerintah Pusat dan Hutang Bunga. Analisis ini bertujuan mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor/donatur/pihak ketiga dalam membiayai pembangunan.

$$\text{Rasio Hutang Terhadap} \\ \text{Aset} (\text{Debt Ratio}) = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}}$$

d. Rasio Hutang terhadap Modal

Rasio hutang terhadap Modal adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya menggunakan modal yang dimilikinya. Rasio hutang terhadap modal dihitung dengan membandingkan total hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jumlah modal. Kewajiban tersebut terdiri dari Hutang pada pihak ketiga, Hutang Luar Negeri, Hutang pada Pemerintah Pusat dan Hutang Bunga.

$$\text{Rasio Hutang Terhadap Modal} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Modal}}$$

Tabel 3.5.
Perkembangan Penghitungan Neraca Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
A	Rasio Likuiditas						
1.	Rasio Lancar (Kas/Hutang Jangka Pendek)	8,09	1,71	2,83	7,82	7,93	13,76
2.	Rasio Cair ((Aset Lancar-Persediaan)/Hutang Jangka Pendek)	6,55	1,38	2,17	7,52	7,60	13,45
B	Rasio Solvabilitas	0,004	0,018	0,012	0,015	0,020	0,017
1.	Rasio Hutang Terhadap Aset (<i>Debt Ratio</i>) (Total Kewajiban/Total Aset)	0,006	0,022	0,012	0,016	0,021	0,018
2.	Rasio Hutang Terhadap Modal	8,09	1,71	2,83	7,82	7,93	13,76

Sumber : DPPKAD Kabupaten Rembang 2016 (data diolah)

Dari Tabel 3.5 di atas secara ringkas dapat dilakukan analisis atas kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai berikut:

- a. Rasio Lancar (*Current Ratio*) selalu meningkat dari tahun 2010 sebesar 8,09 menjadi 13,76 pada tahun 2015. Hal ini mengindasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya cukup baik, karena

Pemerintah Kabupaten Rembang menerapkan kebijakan pinjaman daerah dilakukan dengan sangat hati-hati.

- b. Rasio Cair (*Quick Ratio*) selama lima tahun mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2010 sebesar 6,55 menjadi sebesar 13,45 pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menggunakan aktiva lancar untuk menutupi utang lancarnya dalam kondisi baik karena berada diatas angka 1. Idealnya, rasio lancar berada pada angka 1:1 atau minimal 0,8:1 karena apabila kurang dari itu, pemerintah daerah dianggap memiliki masalah keuangan.
- c. Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt Ratio*) Pemerintah Kabupaten Rembang cenderung rendah sejak tahun 2010 hingga tahun 2015, yaitu sebesar 0,006 pada tahun 2010 dan naik menjadi 0,018 pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa solvabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam keadaan yang sehat, yaitu persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor/donatur/pihak ketiga dalam membiayai pembangunan adalah rendah.
- d. Rasio Hutang terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Rembang cenderung rendah sejak tahun 2010 hingga tahun 2015, yaitu sebesar 8,09 pada tahun 2010 dan naik menjadi 13,76 pada tahun 2015. Hal tersebut berarti bahwa jumlah dana yang disediakan dalam membiayai pembangunan sebagian besar bersumber dari kemampuan keuangan sendiri, bukan berasal dari pinjaman kreditor/donatur/pihak ketiga.

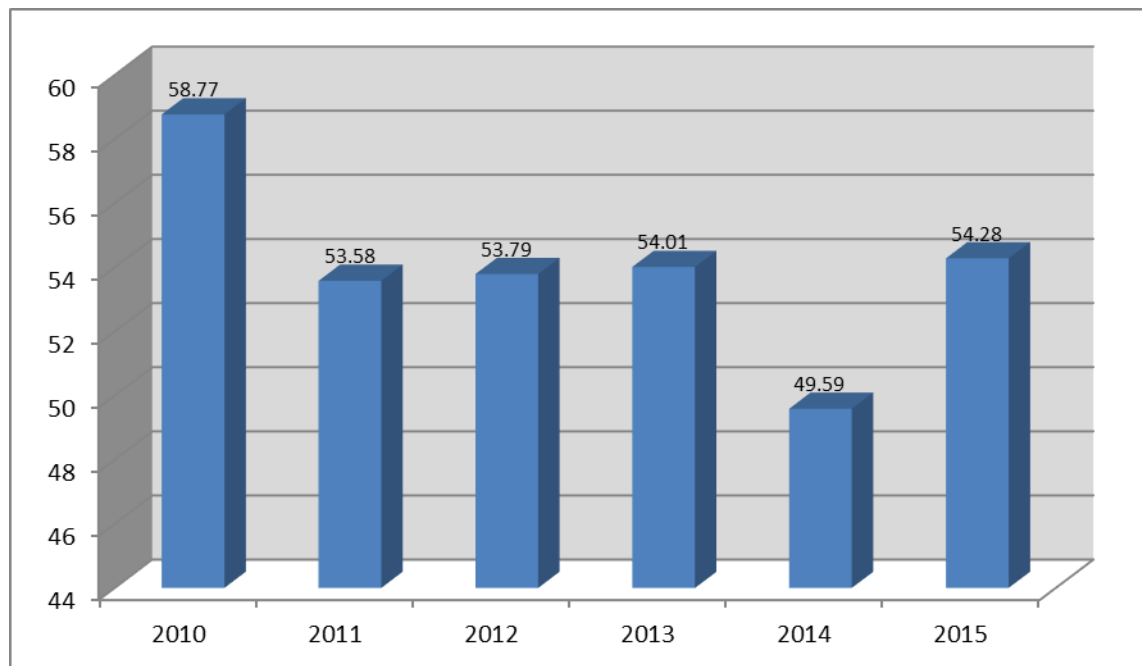
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2011-2015

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu juga dapat dilihat dari proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah. Tujuan penghitungan rasio Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah adalah untuk mengetahui proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah. Data Belanja Pegawai di sini adalah penjumlahan dari Belanja Pegawai Langsung dan Belanja Pegawai Tidak Langsung. Rasio ini menggambarkan bahwa semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD

yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil angka rasio Belanja Pegawai maka semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai.

Grafik Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2010-2015 seperti diperlihatkan oleh gambar 3.14 berikut ini.



Gambar 3.14
Grafik Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah
Tahun 2010-2015 (%)

Sumber : DPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2016

Kondisi yang terjadi di Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir Rasio Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah cenderung menurun. Dengan demikian maka kabupaten Rembang mempunyai kesempatan dalam mendorong roda perekonomian melalui perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah dengan semakin besarnya porsi Belanja Langsung terhadap total belanja daerah. Belanja Langsung yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan potensi-penerimaan daerah yang baru. Rasio Belanja Langsung terhadap total belanja daerah mencerminkan

porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk pembangunan daerah. Belanja Langsung, merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri, oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan Analisis belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut:

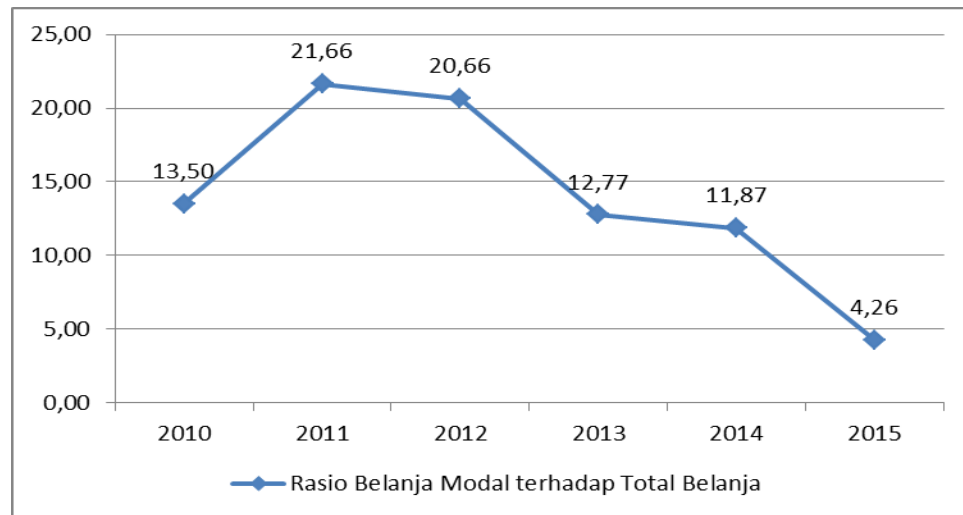
Tabel 3.6.
Perkembangan Analisis Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	446,737,360,440	515,741,137,542	585,963,058,625	656,398,928,522	723,159,449,945	755,600,461,336
2	Total Belanja Daerah	682,417,177,954	868,099,999,176	969,210,493,453	1,060,672,838,715	1,275,910,680,987	1,218,807,174,406
3	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	65.46%	59.41%	60.46%	61.89%	56.68%	62.00%

Sumber : DPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2016

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah mencerminkan porsi Belanja Daerah yang dibelanjakan untuk membiayai Belanja Modal. Belanja Modal ditambah belanja barang dan jasa merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, di samping pengaruh dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Realisasi Belanja Modal akan memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, diharapkan akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Grafik Proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Rembang tahun 2010-2015 terlihat pada gambar 3.15 berikut:



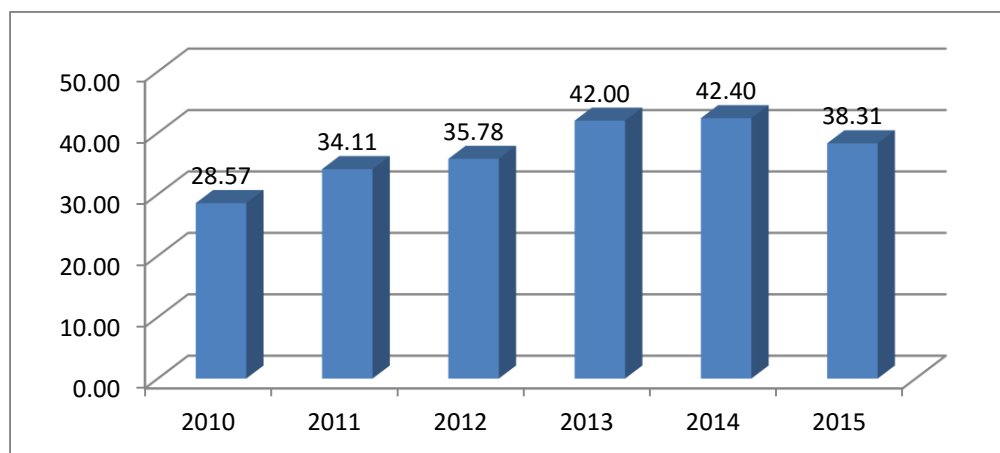
Gambar 3.15
Grafik Proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 (%)

Sumber: DPPKAD Kabupaten Rembang (data diolah)

Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu juga dapat dilihat dari ruang fiskal. Peter Heller dalam tulisan yang dipublikasikan IMF memberikan definisi bahwa ruang fiskal adalah ruang dalam anggaran pemerintah yang memungkinkan pemerintah untuk menyediakan sumberdaya untuk suatu tujuan tanpa membahayakan kesinambungan posisi keuangan atau stabilitasi ekonomi negara (daerah). Dari definisi di atas tampak bahwa ruang fiskal adalah “sisa” setelah rencana pengeluaran pemerintah dirinci dan diputuskan.

Ruang fiskal (*fiscal space*) merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah seperti pembangunan infrastruktur daerah. Perhitungan ruang fiskal daerah, yaitu total Pendapatan Daerah dikurangi dengan Pendapatan Hibah, pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*), dan belanja yang sifatnya mengikat, yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Bunga, kemudian dibagi dengan total pendapatannya.

Indikator ini pada dasarnya menunjukkan seberapa besar ruang fiskal atau keleluasaan yang dimiliki daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja yang akan didanai. Ukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar pendapatan daerah harus dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari, seperti gaji PNS, dan selain itu terdapat berbagai jenis pendapatan yang bersifat *earmarked* (ditentukan penggunaannya). Ruang fiskal diperoleh dari pendapatan setelah dikurangi pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*) serta belanja yang sifatnya mengikat seperti belanja pegawai dan belanja bunga. Semakin besar dana yang masih bisa digunakan secara bebas oleh daerah ditunjukkan dengan Ruang Fiskal yang semakin besar. Grafik Rasio Ruang Fiskal Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada gambar 3.16 berikut:



Gambar 3.16
Grafik Rasio Ruang Fiskal
Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 (%)
Sumber : DPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2016

Berdasarkan Gambar 3.16 terlihat bahwa ruang fiskal di Kabupaten Rembang juga mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2010 ruang fiskal yang tersedia sebesar 28,57% dari total Pendapatan meningkat pada tahun 2015 ruang fiskal di Kabupaten Rembang telah mampu mencapai sebesar 38,31% dari total pendapatan. Tentu saja kondisi ini sangat dipengaruhi dengan

semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah selama lima tahun terakhir.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pendanaan pembangunan daerah diluar kapasitas pendapatan daerah serta kewajiban-kewajiban yang menjadi beban pemerintah daerah. Analisis pembiayaan daerah tidak dapat terlepas dari kondisi defisit yang terjadi dalam APBD sehingga diperlukan pendanaan dari penerimaan pembiayaan daerah. Defisit riil dalam APBD terjadi apabila pendapatan daerah dikurangi dengan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah menimbulkan adanya defisit dalam APBD. Kondisi defisit riil APBD Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2015 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7.
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2015

No	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	681.400.890.462,62	873.464.930.507,62	1.017.711.677.635,86	1.165.433.076.124,01	1.329.587.756.593,27	1.416.781.811.493,80
	Dikurangi realisasi:						
2.	Belanja Daerah	682.417.177.954,00	868.099.999.176,00	969.210.493.453,00	1.060.672.838.714,84	1.275.910.680.987,06	1.218.804.775.992,74
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.175.435.482,00	53.450.842,00	14.440.865.413,00	5.253.450.842,00	11.162.450.842,00	10.670.450.843,00
3.	Defisit riil	-5.191.722.973	5.311.480.490	34.060.318.770	99.506.786.567	42.514.624.764	187.306.584.658

Sumber : DPPKAD Kabupaten Rembang, 2016 (data diolah)

Tabel 3.8.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupten Rembang Tahun 2010 – 2015

No	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	29.312.122.883,07	28.118.099.945,69	33.462.940.243,31	67.555.128.713,17	167.066.868.874,34	209.301.180.147,55
2	Penerimaan kembali dari pemberian pinjaman	2.493.984.640,00					
3	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00					

Sumber : DPPKAD Kabupaten Rembang, 2016 (data diolah)

Besarnya SiLPA pada akhir tahun menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Rasio SiLPA terhadap total belanja daerah diharapkan akan semakin turun mengingat tingginya SiLPA yang terjadi bisa menunjukkan rendahnya penyerapan belanja daerah. Namun demikian, besarnya SiLPA juga disebabkan adanya dana dari pusat yang bersifat *earmark* dan tidak dapat terserap pada akhir tahun anggaran dan sisa saldo kas pada BLUD. Rasio SiLPA terhadap total belanja di Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2015 mencapai rasio tertinggi pada tahun 2013, dengan kontribusi sebesar 14,74%. Secara umum rasio dan kontribusi SILPA terhadap Total Belanja Daerah trendnya meningkat. Rasio/Kontribusi SILPA terhadap Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel 3.9.

Tabel 3.9.
Rasio/Kontribusi SILPA terhadap Belanja Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2010-2015

Tahun	SILPA	Total Belanja	Rasio SILPA terhadap Belanja Daerah
2010	28.114.384.550	682.417.177.954	4,12
2011	33.429.580.435	868.099.999.176	3,85
2012	67.523.259.013	969.210.493.453	6,97
2013	167.061.915.280	1.060.672.838.715	15,75
2014	209.581.493.639	1.275.910.680.987	16,43
2015	396.607.764.806	1.218.804.775.993	32,54

Sumber : DPPKAD Kabupaten Rembang 2016 (data diolah)

3.3. Kerangka Pendanaan

Mendasarkan pada realisasi pendapatan daerah tahun 2010-2015, pendapatan daerah Kabupaten Rembang diproyeksikan mengalami peningkatan, dari sebesar Rp 1,562,339,652,526,00 pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp 2,465,719,261,753,00 pada tahun 2021. Beberapa asumsi yang mendasari peningkatan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Pajak daerah meningkat setiap tahunnya sebesar 14,00%, asumsi tersebut didasarkan pada pertimbangan potensi yang ada dan kemampuan obyek pajak. Masih terdapat potensi pendapatan dari pos Pajak Daerah yang dapat dioptimalisasikan pemungutannya. Peningkatan pajak daerah juga dilakukan melalui intensifikasi dengan penerapan aturan (Perda tentang pajak daerah) secara optimal. Selain itu peningkatan pajak juga diprediksi dari beroperasinya pabrik semen yang akan meningkatkan pajak Minerba dan juga pajak penerangan jalan (PPJ); kenaikan pajak juga diprediksi dari intensifikasi Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB- P2). Selain itu perlu dilakukan akselerasi peningkatan aktivitas perekonomian, sehingga akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat, sehingga kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) masyarakat meningkat.
2. Pendapatan Retribusi diperkirakan akan mengalami penurunan karena perpindahan pos dari retribusi pos pelayanan PPK BLUD Puskesmas menjadi masuk ke pos lain-lain PAD yang sah. Retribusi daerah diprediksi akan meningkat sebesar 6,00% per tahun. Asumsi tersebut didasarkan pada potensi retribusi dari beberapa jenis yang terus menurun (retribusi pasar retribusi terminal), sedangkan retribusi yang meningkat relatif juga terbatas (retribusi TPI). Meskipun demikian, perlu dilakukan kajian untuk peningkatan pendapatan dari retribusi daerah ini.
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meningkat sebesar 7,48%, (potensi yang diperoleh dari penyertaan modal, bukan dari BUMD). Untuk selanjutnya diperlukan kajian dan perencanaan dan peningkatan pendapatan dari BUMD dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meningkat sebesar 14,50% per tahun (untuk pertumbuhan BLUD kembali ke RS – jasa giro dan deposito)
5. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak tidak mengalami peningkatan atau relatif tetap per tahun dengan menggunakan angka dasar alokasi tahun 2016,

6. Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan menurun Rp.113.763.525.040,00 pada tahun 2016 akibat terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 tentang penundaan dana transfer daerah dan diasumsikan meningkat sebesar 8,61% per tahun, diperhitungkan relatif rendah (moderat), karena pemindahan belanja pegawai untuk guru pendidikan menengah,
7. Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Non fisik tidak mengalami peningkatan atau relatif tetap per tahun dengan menggunakan angka dasar alokasi tahun 2016,
8. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya tidak mengalami peningkatan atau relatif tetap per tahun dengan menggunakan angka dasar alokasi tahun 2016,
9. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus meningkat sebesar 10% per tahun,
10. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya tidak mengalami peningkatan atau relatif tetap per tahun dengan menggunakan angka dasar alokasi tahun 2016.

Belanja daerah diproyeksikan meningkat dari sebesar Rp1,949,203,461,765,00 pada tahun 2016 menjadi Rp 2,472,605,379,730,00 pada tahun 2021, dengan kebijakan: Proporsi Belanja Tidak Langsung dengan Belanja Langsung dipertahankan untuk Belanja Tidak Langsung pada kisaran sama atau lebih kecil dari 60% dari Total Belanja dan Belanja Langsung lebih besar atau sama dengan 40% dari total Belanja.

Adapun penerimaan Pembiayaan terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), tidak direncanakan. Di sisi lain direncanakan penyertaan modal melalui pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.5.000.000.000,00 yang bersumber dari surplus belanja.

Secara rinci proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel 3.10 berikut ini.

Tabel 3.10.
Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2016 – 2021

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	PENDAPATAN	1,417,176,961,493.80	1,562,339,652,526	1,807,514,355,012	1,949,446,340,534	2,105,443,413,129	2,276,985,656,913	2,465,719,261,753
1	Pendapatan Asli Daerah	200,954,036,864.80	213,963,928,144.00	242,662,543,921	275,359,398,151	312,621,607,610	355,097,398,424	403,527,750,962
	Pendapatan Pajak Daerah	42,306,265,606.00	41,678,500,000	47,513,490,000	54,165,378,600	61,748,531,604	70,393,326,029	80,248,391,673
	Hasil Retribusi Daerah	32,230,052,368.00	19,493,370,500	20,662,972,730	21,902,751,094	23,216,916,159	24,609,931,129	26,086,526,997
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,447,117,385.00	6,564,456,000	7,055,477,309	7,583,227,011	8,150,452,392	8,760,106,231	9,415,362,177
	Lainlain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	121,970,601,505.80	146,227,601,644	167,430,603,882	191,708,041,445	219,505,707,455	251,334,035,036	287,777,470,116
2	Dana Perimbangan	843,789,609,235.00	851,944,331,040.00	1,032,565,633,849	1,106,009,130,829	1,185,776,112,899	1,272,411,032,126	1,366,505,217,898
	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	22,278,754,235.00	21,449,240,000	21,449,240,000	21,449,240,000	21,449,240,000	21,449,240,000	21,449,240,000
	Dana Alokasi Umum	723,091,447,000.00	672,380,985,000	853,002,287,809	926,445,784,789	1,006,212,766,859	1,092,847,686,086	1,186,941,871,858
	Dana Alokasi Khusus fisik	98,419,408,000.00	141,155,200,000	141,155,200,000	141,155,200,000	141,155,200,000	141,155,200,000	141,155,200,000
	DAK Non Fisik		16,958,906,040	16,958,906,040	16,958,906,040	16,958,906,040	16,958,906,040	16,958,906,040
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	372,433,315,394.00	496,431,393,342.00	532,286,177,242.00	568,077,811,554.50	607,045,692,619.94	649,477,226,362.73	695,686,292,893.43
	Pendapatan Hibah	138,351,272.00	1,566,904,000	-	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	93,284,137,342.00	93,284,137,342	93,284,137,342	93,284,137,342	93,284,137,342	93,284,137,342	93,284,137,342
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:	268,637,095,000.00	374,216,879,000.00	411,638,566,900.00	447,430,201,212.50	486,398,082,277.94	528,829,616,020.73	575,038,682,551.43
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10,373,731,780.00	27,363,473,000	27,363,473,000	27,363,473,000	27,363,473,000	27,363,473,000	27,363,473,000

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B	BELANJA	1,218,804,775,992.74	1,938,411,470,595	1,802,514,355,012	1,944,446,340,534	2,100,443,413,129	2,271,985,656,913	2,460,719,261,753
1	Belanja Tidak Langsung	849,862,882,664.00	1,146,346,553,786	1,136,126,246,229	1,203,177,044,063	1,275,509,233,218	1,353,052,696,689	1,450,926,224,724
	Belanja Pegawai	661,607,200,077.00	811,860,031,286	804,153,032,850	844,360,684,493	886,578,718,717	930,907,654,653	977,453,037,386
	Belanja bunga	7,985,987.00	37,000,000	-	-	-	-	-
	Belanja Subsidi			-	-	-	-	-
	Belanja Hibah	23,873,745,800.00	23,420,353,500	17,612,419,875	16,462,684,457	15,865,274,078	15,382,950,780	29,735,927,338
	Belanja Bantuan Sosial	2,714,000,000.00	8,855,000,000	22,348,322,650	22,532,720,686	22,735,392,082	22,958,259,765	23,203,462,465
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	6,157,224,400.00	6,455,961,000	6,817,646,273	7,606,812,969	8,496,544,776	9,500,325,716	10,633,491,867
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	155,502,726,400.00	294,948,833,000	284,194,824,581	311,214,141,459	340,833,303,564	373,303,505,774	408,900,305,668
	Belanja Tidak Terduga		769,375,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
2	Belanja Langsung	368,941,893,328.74	792,064,916,809	666,388,108,782	741,269,296,471	824,934,179,912	918,932,960,223	1,009,793,037,029
	Belanja Pegawai	113,995,499,657.00	98,396,548,315	81,246,278,829	91,251,525,641	102,453,099,076	115,059,415,530	127,236,849,653
	Belanja Barang dan Jasa	202,965,666,652.74	241,258,500,848	203,514,104,692	226,078,153,864	251,281,113,051	279,589,659,052	306,955,721,023
	Belanja Modal	51,980,727,019.00	452,409,867,646	381,627,725,261	423,939,616,966	471,199,967,785	524,283,885,641	575,600,466,353
	Surplus/ Defisit	198,372,185,501	(376,071,818,069)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
C	PEMBIAYAAN DAERAH							
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	209,301,180,147.55	389,396,818,069.00	-	-	-	-	-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	209,301,180,147.55	389,396,818,069	-	-	-	-	-

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Sebelumnya							
	Penerimaan Kembali Pemberi Pinjaman		-					
	Penerimaan Kembali Investasi		-					
	Penerimaan Pinjaman Daerah							
	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah							
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10,670,450,843.00	13,325,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10,617,000,000.00	13,270,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
	Pembayaran Pokok Utang	53,450,843.00	55,000,000					
	Pemberian Pinjaman Daerah							
	Pembiayaan Netto	198,630,729,304.55	376,071,818,069.00	(5,000,000,000.00)	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)
	Sisal Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	397,002,914,805.61	-	-	-	-	-	-

Di atas telah disampaikan proyeksi pendanaan pada tahun 2016 – 2021 yang akan datang. Selanjutnya untuk mengetahui kapasitas riil dalam pembangunan daerah dilakukan proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat sebagaimana tercantum pada Tabel 3.11, kemudian di hitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum pada Tabel 3.12.

Tabel 3.11.
Proyeksi Belanja Dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Kabupaten Rembang
Tahun 2016 - 2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Belanja Tidak Langsung	818,352,992,286	810,970,679,123	851,967,497,462	895,075,263,494	940,407,980,369	988,086,529,253
	Belanja Pegawai	811,860,031,286	804,153,032,850	844,360,684,493	886,578,718,717	930,907,654,653	977,453,037,386
	Belanja Bunga	37,000,000	-	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota/Pemerintah Desa	6,455,961,000	6,817,646,273	7,606,812,969	8,496,544,776	9,500,325,716	10,633,491,867
B	Belanja langsung	134,370,595,248	147,807,654,773	162,588,420,250	178,847,262,276	196,731,988,503	216,405,187,353
	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.	125,395,049,623	137,934,554,585	151,728,010,043	166,900,811,048	183,590,892,153	201,949,981,368
	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	906,400,000	997,040,000	1,096,744,000	1,206,418,400	1,327,060,240	1,459,766,264
	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	6,825,568,907	7,508,125,798	8,258,938,378	9,084,832,216	9,993,315,437	10,992,646,981
	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	1,202,821,718	1,323,103,890	1,455,414,279	1,600,955,707	1,761,051,277	1,937,156,405
	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	40,755,000	44,830,500	49,313,550	54,244,905	59,669,396	65,636,335

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
C	Pengeluaran Pembiayaan	55,000,000	-	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
	Pembayaran Pokok Utang	55,000,000.00	-	-	-	-	-
	TOTAL (A+B+C)	952,778,587,534	958,778,333,896	1,014,555,917,712	1,073,922,525,770	1,137,139,968,872	1,204,491,716,606

Tabel 3.12.
Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2016 - 2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Total Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan	1,962,528,461,765.00	1,818,520,838,581.68	1,960,669,461,427.94	2,116,885,337,720.59	2,288,648,573,238.17	2,477,605,379,730.41
	Pendapatan	1,573,131,643,696.00	1,818,520,838,581.68	1,960,669,461,427.94	2,116,885,337,720.59	2,288,648,573,238.17	2,477,605,379,730.41
	Penerimaan Pembiayaan	389,396,818,069.00	-	-	-	-	-
	Dikurangi:						
B	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	952,778,587,534.00	958,778,333,896.30	1,014,555,917,712.20	1,073,922,525,769.80	1,137,139,968,872.08	1,204,491,716,605.92
	Kapasitas riil kemampuan keuangan (A-B)	1,009,749,874,231.00	859,742,504,685.38	946,113,543,715.74	1,042,962,811,950.79	1,151,508,604,366.09	1,273,113,663,124.49

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 secara rinci tercantum pada Tabel 3.13 berikut ini.

Tabel 3.13.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2016 – 2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Total Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan	1,962,528,461,765.00	1,818,520,838,581.68	1,960,669,461,427.94	2,116,885,337,720.59	2,288,648,573,238.17	2,477,605,379,730.41
1.	Pendapatan	1,573,131,643,696.00	1,818,520,838,581.68	1,960,669,461,427.94	2,116,885,337,720.59	2,288,648,573,238.17	2,477,605,379,730.41
2.	Penerimaan Pembiayaan	389,396,818,069.00	-	-	-	-	-
B	Prioritas I (Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama)	952,778,587,534.00	958,778,333,896.30	1,014,555,917,712.20	1,073,922,525,769.80	1,137,139,968,872.08	1,204,491,716,605.92
1	Belanja Tidak Langsung	818,352,992,286.00	810,970,679,123.30	851,967,497,462.20	895,075,263,493.80	940,407,980,369.08	988,086,529,252.92
2	Belanja Langsung	134,370,595,248.00	147,807,654,773.00	162,588,420,250.00	178,847,262,276.00	196,731,988,503.00	216,405,187,353.00
3	Pengeluaran Pembiayaan	55,000,000.00	-	-	-	-	-
	Kapasitas riil kemampuan keuangan (A-B)	1,009,749,874,231.00	859,742,504,685.38	946,113,543,715.74	1,042,962,811,950.79	1,151,508,604,366.09	1,273,113,663,124.49
C	Prioritas II (Belanja Langsung untuk Program Unggulan Kepala daerah dan Program Prioritas diluar Belanja Langsung Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama)	668,486,312,731.00	529,443,941,539.90	589,751,526,052.31	657,362,764,515.54	733,682,850,272.80	805,078,077,283.30
	Belanja Langsung	668,486,312,731.00	529,443,941,539.90	589,751,526,052.31	657,362,764,515.54	733,682,850,272.80	805,078,077,283.30

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
D	Prioritas III	341,263,561,500.00	330,298,563,145.48	356,362,017,663.44	385,600,047,435.25	417,825,754,093.29	468,035,585,841.19
a	Belanja Tidak Langsung	327,993,561,500.00	325,298,563,145.48	351,362,017,663.44	380,600,047,435.25	412,825,754,093.29	463,035,585,841.19
	Belanja Hibah	23,420,353,500.00	17,719,667,051.14	16,557,461,467.87	15,951,493,098.45	15,461,743,577.03	29,806,962,582.99
	Belanja Bantuan Sosial	8,855,000,000.00	22,362,622,273.49	22,547,301,764.29	22,750,257,430.77	22,973,412,226.35	23,218,904,909.35
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/ Kab/ Kota	294,948,833,000.00	284,216,273,820.85	311,257,254,431.28	340,898,296,906.04	373,390,598,289.92	409,009,718,348.85
	Belanja Tidak Terduga	769,375,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
b	Pengeluaran Pembiayaan	13,270,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	13,270,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
	Surplus Anggaran Riil/Berimbang	-	-	-	-	-	-